



**KONFLIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

LAPORAN PENELITIAN

OLEH :

NUNIK RETNO HERAWATI, S.SOS, MSi

NIP 19711030.199903.2.001

**Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP
Tahun Anggaran 2011**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : KONFLIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
2. Ketua Penelitian :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : **Nunik Retno Herawati, S.Sos, Msi**
 - b. Golongan Pangkat dan NIP : III A/19711030 199903 2 001
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Fakultas/Jurusan : ISIP/Illmu Pemerintahan
3. Alamat Peneliti :
 - a. Alamat Kantor : Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang
Semarang Kotak Pos 1269
Telp/Fax : (024) 7465407
www.fisip.undip.ac.id
 - b. Alamat Rumah : Jl. Taman Udan Riris III/42 Semarang
4. Lokasi Penelitian : Jawa Tengah
5. Waktu Penelitian : 3 Bulan
6. Biaya Penelitian : Rp Rp 3.789.473,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
7. Sumber Dana : Dana DIPA FISIP UNDIP
Tahun Anggaran 2011

Semarang, Mei 2011

Ketua Peneliti,

Nunik Retno H. S.Sos, M.Si
NIP. 19711030 199903 2 001

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pembantu Dekan II
FISIP UNDIP

Drs. Handoyo DW, MSi
NIP. 1958011710 1 001



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : KONFLIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
2. Ketua Penelitian :
- a. Nama Lengkap : **Nunik Retno Herawati, S.Sos, Msi**
- b. Jenis Kelamin : **P**
- c. NIP : 19711030 199903 2 001
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/IIIA
- f. Fakultas/Jurusan : ISIP/Ilmu Pemerintahan
- g. Pusat Penelitian : -
- h. Alamat Kantor : Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang Semarang Kotak Pos
1269
- I Telp / Fax : (024) 7465407 / (024) 7465405
- j. Alamat Rumah : Jl. Taman Udan Riris III/42 Semarang
- k. Telp / Fax / Email : 081575573336 /
3. Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan
4. Pembiayaan : Rp Rp 3.789.473,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh
Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

Semarang, 28 Juli 2011

Ketua Peneliti,

Nunik Retno H, S.Sos, M.Si
NIP. 19711030 199903 2 001

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian

Prof.Drs.Imam Ghozali,M.Com,Akt,Ph.D
NIP. 19580816 198603 1 002



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan, rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul “KONFLIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

Laporan penelitian ini pada dasarnya tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyusunan proposal sampai penelitian lapangan. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya semoga kerjasamanya tidak hanya berhenti sampai setelah penelitian ini selesai namun tetap berlanjut di kemudian hari.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangannya, untuk itu masukan dan kritikan akan kami terima dengan senang hati untuk penyempurnaan laporan penelitian ini maupun kegiatan penelitian selanjutnya.

Semarang, Juli 2011

Peneliti

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si

NIP : 19711030 199903 2 001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang kami susun dengan judul

Konflik Eksekutif dan legislatif Daerah

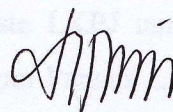
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 28 Juli 2011

Pembuat Pernyataan,



Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si
NIP. 19711030 199903 2 001

ABSTRAKSI

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan DPRD (Badan Legislatif) dan Pemerintah Daerah (Eksekutif Daerah) sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama berperan dalam menetapkan kebijakan politik dan pemerintahan di daerah. Namun demikian telah terjadi perbedaan tentang pemaknaan terhadap besar kecilnya peran tentang hak dan wewenang DPRD terhadap eksistensi kewenangan Kepala Daerah telah memberikan wacana yang berpengaruh terhadap hubungan kemitraan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif daerah. Dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebenarnya sudah jelas diatur bahwa fungsi legislatif tersebut yakni legislasi, anggaran serta controlling (pengawasan). Fungsi pengawasan yang dilakukan legislatif inilah yang membuat hubungan kedua lembaga memanas.

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan melihat hubungan eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan otonom daerah. Penelitian ini mengambil Propinsi Jawa Tengah sebagai obyek penelitian. Penelitian ini mengambil studi kasus pada LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2010.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan eksekutif Legislatif di Jawa Tengah memang sedikit diwarnai dinamika karena ada sedikit gesekan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Satu kasus yang menyebabkan konflik adalah adanya kasus LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2010 yang dinilai tidak layak sebagai dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, karena banyak melakukan pengulangan/pengkopian dengan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2009, dimana secara substansi kemudian menimbulkan permasalahan. Selain aspek administratif, ada nuansa politis di balik terjadinya kasus copy paste LKPJ 2010. Penyelesaian kasus Copy Paste LKPJ tampaknya berjalan mulus karena adanya kompromi politis antara Gubernur dengan Pansus LKPJ. Kasus copy paste LKPJ 2010 memang sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap pemerintahan. Secara politis kasus LKPJ ini juga memiliki imbas negatif. Kewibawaan Gubernur tercoreng, dan ini tentu saja akan bisa membawa dampak tidak langsung pada pencitraan Gubernur Bibit Waluyo. Penyelesaian kasus Copy Paste LKPJ tampaknya berjalan mulus karena adanya kompromi politis antara Gubernur dengan Pansus LKPJ

ABSTRACT

Enactment of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government hinted Parliament (Legislative Council) and Local Government (Regional Executive) as organizer of the local government together play a role in setting policy and governance in the region. However, there has been a difference of interpretation of the size of the role of the right and authority to the existence of the authority of Parliament has given the Regional Head of discourse that affect the partnership between the Legislature and the Executive Board area. In Act number 32 of 2004 on local government, is already clearly regulated that the legislative function is the legislation, budgeting and controlling (supervision). Legislative oversight function performed is what makes the relationship heats up both institutions.

This study aims to look basically the executive and legislative relations in the implementation of autonomous regions. This study took the Province of Central Java as an object of research. This research takes a case study in the report is the Governor of Central Java in 2010.

Research results indicate that the association executive Legislature in Central Java was slightly marred because there is less friction dynamics of local governance. One case that caused the conflict is a case report is the Governor of the end of fiscal year 2010 are considered not viable as a document Description Accountability Report, because a lot of repeating / copying the report is the Governor of Final Fiscal Year 2009, which in substance and cause problems. In addition to the administrative aspect, there are political overtones behind the case of copy and paste the report is 2010. Copy Paste the report is to resolve the case seems to run smoothly because of the political compromise between the Governor with the Pansus. The case report is copy and paste 2010 is a bit much for bringing influence on government. Politically this case report is also having a negative impact. The authority of the Governor has suffered tremendously, and this of course would be an indirect impact on imaging Governor Bibit Waluyo.

DAFTAR ISI

		Halaman
	HALAMAN JUDUL	i
	HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
	KATA PENGANTAR	iii
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
	ABSTRAKSI.....	v
	ABSTRACT	vi
	DAFTAR ISI.....	vii
	DAFTAR TABEL	viii
	DAFTAR PUSTAKA	Ix
	LAMPIRAN.....	x
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Perumusan Masalah	3
	1.3 Tujuan Penelitian	3
	1.4 Kontribusi Penelitian	3
	1.5 Keterbatasan Penelitian	4
	1.6 Tinjauan Pustaka	4
	1.7 Definisi Konseptual	16
	1.8 Metode Penelitian	16
BAB II	GAMBARAN UMUM	
	2.1 Gambaran Propinsi Jawa Tengah.....	18
	A. Pemerintahan	18
	B. Relief	18
	C. Iklim	19
	D. Demografi	19
	E. Suku	20
	2.2 Peta Kekuatan Politik di Jawa Tengah	

		A. Kekuasaan Eksekutif Jawa Tengah 2008 – 2013.....	21
		B. Kekuasaan Legislatif Jawa Tengah 2009 – 2014	26
		C. Hubungan Eksekutif – Legislatif di Jawa Tengah	39
BAB III		LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	
	3.1	Dasar LKPJ	
		A. LKPJ	47
		B. Tujuan LKPJ	47
		C. Sifat LKPJ	47
		D. Ruang Lingkup LKPJ	47
		E. Jenis LKPJ	47
		F. Sumber LKPJ	48
		G. Muatan LKPJ	48
		H. Penyampaian LKPJ	50
		I. Sistematika LKPJ	50
	3.2	LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2010	
		A. Pansus LKPJ Tahun 2010	52
		B. Sumber Konflik LKPJ	53
		C. Bentuk Konflik	58
		D. Dampak Konflik	59
		E. Penyelesaian Konflik	60
BAB IV		SIMPULAN DAN SARAN	
	4.1	Simpulan	61
	4.2	Saran	62
		DAFTAR PUSTAKA	
		LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Komposisi Etnis Jawa Tengah	20
Tabel	2.2	Perolehan Suara Pilgub 2008	22
Tabel	2.3	Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	23
Tabel	2.4	SKPD Propinsi Jawa Tengah	24
Tabel	2.5	Prosentase Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009	27
Tabel	2.6	Perolehan Kursi di DPRD Propinsi Jateng 2009-2014	28
Tabel	2.7	Jenjang Pendidikan Anggota DPRD Jateng 2009 - 2014	29
Tabel	3.1	Anggota Pansus LKPJ 2010	52
Tabel	3.2	Contoh Pengcopian LKPJ 2010 dengan 2009	54

DAFTAR BAGAN

			Halaman
Bagan	3.1	Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	44
Bagan	3.2	Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	45
Bagan	3.3	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	46
Bagan	3.4	Manfaat Pertanggungjawaban	49